



RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021



HERMAN DERU
Gubernur Sumatera Selatan



H. MAWARDI YAHYA
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas rahmat dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Sumatera Selatan telah dapat memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, menggunakan Sistematika yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami beserta Perangkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 ini dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan belumlah sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan baik mengenai data maupun dalam teknis penyajiannya.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021, agar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

DAFTAR ISI

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DASAR HUKUM	1
VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	4
PRIORITAS DAERAH	40
DATA UMUM DAERAH – DATA GEOGRAFIS WILAYAH	40
CAPAIAN KINERJA MAKRO	44
RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	46
1. Pendidikan	46
Dinas Pendidikan Prov. Sumsel	46
2. Kesehatan	53
Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	53
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60
a. Dinas PU, Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel	60
b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel	65
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	69
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel	69
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	78
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel	78
6. Sosial	83
Dinas Sosial Prov. Sumsel	83
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
TAHUN 2021	88
OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN	

SEBELUMNYA	88
INOVASI DAERAH	89
PENUTUP	91

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang beribukota di Kota Palembang resmi dibentuk. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, diatur bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini menggunakan system tunai yang lebih menekankan pada penggunaan sumber daya dan dana (input), diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi (input) yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, maka APBD disusun pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan

kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis daerah dan merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: ***SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA***

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Misi Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, **profesional**, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

- Misi 4 :** Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- Misi 5 :** Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, serta janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Arahan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada Prioritas Pembangunan daerah sekaligus Strategi dan Arah Kebijakan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Strategi dan Arah Kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Tabel

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

VISI : Sumsel Maju Untuk Semua			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.			
1. Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif Berbasis Inovasi Daerah	1.1 Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)	Menggali Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Melalui Sektor Pariwisata dan Industri Pengolahan	Mempercepat berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Selatan. Pengembangan Destinasi Wisata potensial. Membangun Infrastruktur dalam Mempercepat Pembangunan Perekonomian Rakyat. Penyediaan Bank Data, Informasi, Potensi dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Secara Komprehensif, Realtime dan Online.
		Mengoptimalkan Ekonomi Produktif Berbasis Kearifan Lokal	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia agar dapat Meningkatkan Produktivitas dan Daya

			Saing yang Lebih Baik. Pengembangan Kerjasama melalui Program Technopreneur. Meningkatkan Keterampilan, Wawasan, dan Pengetahuan Usaha Mikro untuk Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk. Mendorong Pelaku Usaha Mikro untuk Meningkatkan Standard dan Kualitas Produk. Membuka Wawasan para Usaha Mikro agar mendapat Akses Pembiayaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Menambah Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro mengetahui kelengkapan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan modal dari perbankan.
		Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok	Mengefektifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional

			(PDR).
		Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan. Pengembangan Kerjasama Unsur Akademisi, Bisnis, Government dalam Perumusan Kebijakan.
	1.2 Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	Mendorong Tersedianya Infrastruktur Mendukung Iklim Investasi.	Mendorong Percepatan Infrastruktur Pendukung beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri Lainnya. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik.
		Memfasilitasi Pembangunan Industri Sektor Hilir dari Potensi Ekonomi Masyarakat agar dapat Memberikan Kesempatan Kerja Seluas-Luasnya serta Tingkat Pendapatan Pekerja Lebih Besar dan Lebih Merata.	Mengoptimalkan Proses Perizinan untuk Investasi. Mendorong Kondisi yang Kondusif bagi Investasi. Peningkatan Citra Daerah sebagai Tujuan Investasi yang Menguntungkan Melalui Peningkatan Popularitas dalam berbagai Aspek. Pengemasan Potensi dan Peluang Investasi

			Wilayah menjadi Menarik. Menyusun dan Menyajikan Peluang Kegiatan Penanaman Modal yang Lebih Konkret. Pengembangan Mekanisme Promosi Investasi yang Lebih Efisien dan Efektif yang antara lain Melalui Penyelarasan Kegiatan Promosi Tourism, Trade, And Investment (TTI) dengan OPD terkait serta Peningkatan Penggunaan Media Elektronik yang Meliputi Radio, Televisi, Media Online dan Media Sosial. Pelaksanaan Gelar Promosi Investasi Daerah untuk Mendorong Investor Awareness And Willingness. Fasilitasi Keikutsertaan UKM untuk Promosi dalam Rangka Matchmaking dengan Perusahaan Skala Besar serta Pembinaan Kemitraan
--	--	--	--

			Usaha dengan Strategi Naik Kelas/Aliansi. Kerjasama dengan Pusat Promosi Terpadu di Negara-Negara Tertentu. Peningkatan Pertemuan Bisnis Antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sektor Jasa dan IKM.
		Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan.	Revitalisasi Pasar Tradisional Menuju Pasar Tradisional Modern. Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil dan Menengah. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil dan Menengah. Memfasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil dan Menengah.
	1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan Kawasan Komoditas/Sektor Unggulan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

	Rakyat dan Kedaulatan Pangan)		Meningkatkan Akses Petani Terhadap Sapropdi Berkualitas dan Terjangkau. Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa. Menjamin Ketersediaan Air di Lahan Irigasi dan Non Irigasi. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Prasarana di dan Keluar Sentra Produksi Komoditi Pangan. Mencetak Sawah Baru untuk Meningkatkan Produksi Padi dalam Rangka Meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan. Peremajaan Tanaman yang Sudah Tua atau Kurang Produktif. Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Peningkatan Sarana Panen. Peningkatan Kemampuan SDM Petani dalam Budidaya Tanaman. Penanggulangan OPT. Meningkatkan Harga
--	-------------------------------------	--	---

			Jual Komoditas.
		Peningkatan Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan	Mengupayakan Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan dapat dilaksanakan agar Nilai Jual Nelayan Lebih Tinggi. Mengupayakan Pembudidaya Ikan dapat Memproduksi Pakan Sendiri dengan Mempergunakan Bahan Baku Lokal.
		Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan	Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan. Monitoring Dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan.
		Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Pemantapan Ketersediaan Pangan, Peningkatan Distribusi dan Harga Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan Serta Ketersediaan Pangan. Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat. Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar. Peningkatan Produksi Hasil Ternak. Penanggulangan Penyakit Ternak dan

			Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Pemasaran dan Penerapan Teknologi Hasil Ternak.
		Peningkatan Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Litbang Dan Inovasi.	Riset Berbasis Kebutuhan. Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti. Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis. Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi. Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.
	1.4 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran (Maju Kesejahteraan Masyarakat)	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	Mengembangkan Industri Pengolahan (Manufaktur) untuk Hilirisasi SDA Unggulan dengan Memprioritaskan Penggunaan Sebesar-Besarnya Tenaga Kerja Lokal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Resources)/ Bahan Baku Lokal. Peningkatan Akses Angkatan Kerja Kepada

			Sumber Daya Produktif melalui Peningkatan Keterampilan Pekerja. Pengembangan Program Kemitraan Antara Pemerintah Provinsi dengan Dunia Industri untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Rentan agar dapat Memasuki Pasar Kerja. Meningkatkan Aset Masyarakat Miskin Melalui Bedah Rumah dan Pemanfaatan Pekarangan. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar Berupa Air Bersih, Sanitasi, Bedah Rumah, Sarana Prasarana Kawasan Kumuh, Sarana Perdagangan untuk Orang Miskin, Sarana Industri Untuk Orang Miskin, dan Pemanfaatan Pekarangan (Benih dan Pupuk), Peningkatan
--	--	--	---

			Pemberdayaan SDA Lokal, Meningkatkan Lifeskill Pemuda melalui Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin.
		Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok	Mengefektifkan Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Meningkatkan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR). Intervensi Pemerintah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dalam Daerah Khususnya Beras, antara lain : Adanya Kebijakan Pemda yang Mengatur tentang Gapoktan yang Ada. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam Provinsi dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Beberapa

			Komoditi Pangan.
		Menurunkan Daerah Rawan Pangan	Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pengembangan Ternak di Daerah Pengentasan Kemiskinan.
		Mengoptimalkan Peran Koordinasi dan Konsultasi Kemiskinan	Meningkatkan Peran Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengembangkan Program dan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan.
	1.5 Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi)	Mengoptimalkan pengembangan energi berkelanjutan.	Melaksanakan Pengkajian dan Evaluasi Daerah yang tidak dilalui oleh Jaringan Listrik PLN dengan Meningkatkan Potensi Lokal Berbasis EBT. Melakukan Koordinasi secara Komprehensif bersama Kabupaten/Kota Penghasil Gas untuk Menggalakkan

			Pemanfaatan Gas Rumah Tangga. Memfasilitasi Proses Pengolahan dan Distribusi Kegiatan Pertambangan yang Berada dalam Koridor Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Mendorong Perusahaan Energi dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Meminimalkan Kerusakan Lingkungan. Penataan Pola Hubungan Ekonomi Antar Investor di Sektor Pertanian, Jasa, Pertambangan, dengan Masyarakat Lokal yang Mengedepankan Pendekatan Dialogis dan Partisipatif. Pembangunan Industri Keenergian Kreatif yang berbasis Batubara di Tingkat Masyarakat Lokal. Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Daerah agar Mampu Terlibat
--	--	--	---

			dalam Kegiatan Pertambangan dan Energi.
MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Yang Sehat, Berpendidikan, Profesional, Dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran, Dan Integritas.			
2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter mandiri, poskesdes, polindes, apotik)	Revitalisasi Sarana dan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Sanitasi). Meningkatkan Kapasitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Riset Berbasis Kebutuhan.
		Meningkatkan upaya promotif dan preventif.	Meningkatkan Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit. Membangun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Secara Partisipatif. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan. Peningkatan Ketersediaan, Distribusi serta Konsumsi dan Keamanan Pangan. Meningkatkan Kualitas Kabupaten/Kota Sehat.

		Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.	Meningkatkan Mutu Posyandu. Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, Berimbang Dan Beragam. Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Berbasis Kewilayahan. Meningkatkan Cakupan Ante Natal Care (ANC) Sesuai Standar (10 T).
	2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang. Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah. Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan. Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan

			Keterjangkauan Biaya Pendidikan. Mengefektifkan Keterlibatan Lembaga Pendidikan Berbasis Keagamaan untuk Pengembangan Potensi Lokal.
		Revitalisasi SMK	Penyediaan Guru Produktif. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Alat Praktek). Pengembangan Kurikulum (Link and Match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri). Pembentukan Lembaga-Lembaga Keterampilan/Pelatihan yang Terfokus pada Pengembangan Potensi Lokal.
		Meningkatkan akses layanan perpustakaan terhadap masyarakat.	Meningkatkan Jumlah Ketersediaan dan Kemerataan Bahan Bacaan di Berbagai Jenis Perpustakaan. Memudahkan Akses Terhadap Bahan Bacaan. Mengembangkan Perpustakaan Berbasis

			Inklusi Sosial. Meningkatkan Pemerataan dan Pemanfaatan Akses Layanan Perpustakaan di Masyarakat. Memfasilitasi Layanan Informasi Berbasis Internet di Seluruh Perpustakaan Desa/Kelurahan. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan di Masyarakat. Penyebaran Pusat - Pusat Informasi di Ruang - Ruang Publik. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran Tenaga Perpustakaan. Meningkatkan Fungsi Pembinaan Dalam Rangka Penguatan Sumber Daya Perpustakaan (SDM, Bahan Bacaan, Sarpras, Anggaran). Meningkatkan Promosi Penggunaan Perpustakaan.
		Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi	Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang

		bidang pendidikan.	Dan Inovasi Bidang Pendidikan.
3 Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	3.1 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)	Meningkatkan Implementasi Kebijakan Responsif Gender dan Anak.	Penyusunan, Reviu, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah.
		Meningkatkan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Penyusunan, Review, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah. Peningkatan Pemahaman, Komitmen, serta Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Tentang Pembangunan Responsif Gender, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak. Peningkatan

			Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada berbagai Lembaga Terkait Pembangunan Gender, Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Data Gender dan Anak Serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga. Pembinaan Kepada Organisasi Perempuan serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. Peningkatan Motivasi, Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan untuk Berkiprah dalam Berbagai Sektor Pembangunan. Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Kepemimpinan bagi
--	--	--	--

			Perempuan Khususnya Calon Legislatif (Caleg), Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Organisasi Perempuan. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai Stakeholders Melalui Perjanjian Kerjasama, MoU, dan Keterlibatan Stakeholders Terkait. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
		Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.	Pelatihan Keterampilan, Manajemen Usaha dan Bantuan Alat untuk Para Perempuan yang Membutuhkan.
		Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).	Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pendampingan Teknis Kepada Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Focal Point OPD Provinsi. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Paham PUG. Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan

			Anak (SIGA).
		Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Penguatan Kelembagaan KLA. Pendampingan Teknis Kepada Kabupaten/Kota Menuju Provinsi Layak Anak (Provila). Pelaksanaan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator KLA. Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Anak pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).
		Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui pengoptimalan usaha pencegahan dan penanganan	Pendidikan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO. Sosialisasi, Advokasi, Desiminasi terkait Pemenuhan Hak Perempuan pada Berbagai Situasi (Tenaga Kerja, Lansia, Perempuan Termarginalkan/Minoritas, termasuk Dalam Situasi Bencana)

			Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sesuai SOP. Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. Sistem Pelayanan yang Komprehensif bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peningkatan Koordinasi Jejaring Lembaga yang Menangani Kasus Perempuan dan Anak. Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Kekerasan Perempuan dan Anak (Simfoni).
--	--	--	--

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi Dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Profesional, Dan Responsif.

4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	4.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik	Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif (mengakomodir kelompok masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Publik. Mendorong Pengutamaan
---	---------------------------------------	-----	--	--	--

	Berkualitas)	berkebutuhan khusus).	Kepentingan Publik oleh Pelayanan Publik dengan Pelayanan Birokrasi yang Berbasis Information and Technology (IT). Revitalisasi Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pelayanan Publik. Menempatkan Petugas Pelayanan yang Kompeten (Right Man in The Right Place) dan Menciptakan Perilaku Pelaksana/Petugas dengan Memberikan Pelayanan secara Sopan, Ramah serta saling Menghargai dan Menghormati. Membangun Jaringan Interkoneksi Layanan Publik yang Bersifat Lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di Akses oleh Publik Secara Online 24 Jam/Hari, 7 Hari/Minggu.
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam

			Manajemen Pemerintahan. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Menuju Cyber Province Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan. Membangun Hubungan Administrasi Pemerintah yang Lebih Harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai Bagian dari Proses Reformasi Birokrasi. Memfasilitasi Forum Kepala Daerah se-Sumatera Selatan dengan Menjadwalkan Pertemuan Rutin dalam Jangka Waktu Tertentu. Melakukan Kunjungan ke Semua Daerah Secara Berkala untuk Penyerapan Aspirasi dan Mendorong Keunggulan Potensi Masyarakat.
		Peningkatan publikasi hasil	Riset Berbasis Kebutuhan.

		litbang dan inovasi.	Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti. Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis. Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi. Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.
	4.2 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.	Optimalisasi Penganggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pelaporan yang Baik. Implementasi Aplikasi yang Mengintegrasikan Perencanaan dengan Penganggaran yaitu E-Sumsel. Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan.
		Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	Melibatkan Institusi Pendidikan Tinggi di Daerah sebagai Think Tank Pembangunan Daerah.

			Menjadikan Lembaga Pers dan Media Massa sebagai Mitra Pembangunan Daerah. Melibatkan Unsur LSM/Ormas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan. Menempatkan Posisi Semua Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam Satu Kepentingan Pembangunan Sumatera Selatan Maju. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sumber Pendanaan yang Ada. Mengundang Peraturan Daerah yang Menekankan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Setempat.
	4.3 Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah	Meningkatkan integritas ASN.	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat.

	Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)		Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kinerja Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Meningkatkan Tunjangan ASN Berdasarkan Kinerja.
MISI IV : Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur, Termasuk Infrastruktur Dasar Guna Percepatan Pembangunan Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan, Untuk Memperlancar Arus Barang Dan Mobilitas Penduduk, Serta Mewujudkan Daya Saing Daerah Dengan Mempertimbangkan Pemerataan Dan Keseimbangan Daerah.			
5 Terwujudnya pemerataan pembangunan berkelanjutan	5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)	Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Hutan.	Pemantauan Kualitas Air dan Udara. Meningkatkan Program Perhutanan Sosial. Meningkatkan Program Pengamanan Hutan. Meningkatkan Kegiatan Identifikasi Permasalahan dalam Kawasan Hutan. Pengendalian Kebakaran Hutan.
		Menurunkan emisi GRK di 6 sektor.	Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM. Revitalisasi Karet dan Sawit yang Berkelanjutan. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk

			Mengelola dan Mendaur Ulang Sampah Menjadi Sumber Ekonomi Baru. Mengembangkan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Daerah. Rehabilitasi Lahan. Penggunaan Bibit Pertanian yang Ramah Lingkungan.
		Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	Peningkatan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan Peningkatan Upaya Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air.
		Meningkatkan mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah	Meningkatkan Sistem Early Warning dan Sistem Penanganan Bencana. Meningkatkan System Monitoring dan Informasi Bencana. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air disemua Sektor dan Memastikan

			Keberlangsungan Pengambilan dan Pasokan Air Baku untuk Mengatasi Kelangkaan Air. Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana. Meningkatkan Kecepatan Penanganan Bencana.
		Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Perwujudan Harmonisasi dalam Pemanfaatan, Penataan dan Pengendalian Ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Peningkatan Kinerja Perencanaan Ruang. Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Ruang. Peningkatan Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
	5.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)	Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang,	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Aksesibilitas Darat, Sungai, Udara, dan

			Laut. Menciptakan Pembangunan yang Selaras dengan Kondisi Kewilayahan yang didukung Tersedianya Infrastruktur yang dapat Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Industri Pertambangan Batubara. Pengembangan Sistem Teknologi Baru dalam Efektifitas Sistem Tranportasi Batubara.
		Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik. Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan. Peningkatan Ketersediaan Drainase Perkotaan, dan Pengembangan Lingkungan Permukiman Sehat. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi

			Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara.

MISI V : Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni, Dan Budaya Untuk Membangun Karakter Kehidupan Sosial Yang Agamis & Berbudaya, Dengan Ditopang Fisik Yang Sehat

Melalui Kegiatan Olahraga, Sedangkan Pengembangan Pariwisata Berorientasi Pariwisata Religius.

6 Terwujudnya masyarakat madani	6.1 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Meningkatkan Kemampuan Aparat Hukum (Penegak Perda/Satpol PP dan PPNS) Melalui Pelatihan dan Pembekalan Aparat Penegak Perda (Satpol PP dan PPNS) untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Penegak Perda). Menertibkan Administrasi Maupun Teknis dalam Pelaksanaan Penegakan Perda. Mengoptimalkan Pencegahan untuk Mengurangi Pelanggaran Perda dengan Melakukan
---------------------------------	--	---	---

			Sosialisasi, Pembinaan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Baik Internal Maupun Eksternal. Optimalisasi Peranan Tim Penegakan Perda Bersama Tim Terkait. Meningkatkan Penanganan Bencana (Tanggap Darurat). Meningkatkan Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan.
		Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Konflik Sosial.	Meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Masyarakat dan Parpol. Memfasilitasi Semua Aktifitas Lembaga Kebudayaan dan Keagamaan untuk Berpartisipasi dalam Membangun Penguatan Toleransi dalam Kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air. Mengoptimalkan

			Pengembangan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
		Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius.	Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama. Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan. Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz. Mendorong Penguatan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Keagamaan Masyarakat agar Terbentuk Masyarakat Madani dan Religius.
7 Meningkatkan daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi	7.1 Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)	Meningkatkan daya saing pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.	Mengembangkan Obyek Daya Tarik Wisata Religi, Sport Tourism dan Wisata Alam Potensial. Peningkatan Aksesibilitas Khususnya Infrastruktur Jalan Menuju Objek dan Daya Tarik Wisata dan Jaringan Internet, Peningkatan Amenitas Higiene dan Sanitasi. Peningkatan Atraksi/Daya Tarik

			Wisata. Pengembangan Pemasaran (Branding, Advertising Dan Selling). Pengembangan Kapasitas SDM, Diklat dan Sertifikasi Profesi serta Usaha Pariwisata.
		Peningkatan Aset Budaya Lokal	Mengefektifkan Program Sriwijaya 2020. Revitalisasi Museum dan Aset Budaya Lokal. Reinventing Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal dalam Membangun Identitas Kultural Masyarakat. Mendorong Memajukan Bahasa Lokal sebagai Kekayaan Khas Budaya Sumatera Selatan. Membangun Akses Ruang-Ruang Kreatif, Seni dan Budaya yang Mampu Menciptakan Ruang Publik yang Berbudaya di Seluruh Wilayah Sumsel. Menjamin Kebebasan untuk Mengembangkan dan Mengekspresikan

			Seni Budaya Masing-Masing di Daerah Sumatera Selatan. Mendorong Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal Kedalam Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah-Sekolah sebagai Proses Pengembangan Budaya Lokal yang dapat Berkontribusi dalam Membangun Karakter Bangsa. Meningkatkan Kemampuan Peserta Melalui Pembinaan oleh Pelatih Qasidah.
		Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi.	Riset Berbasis Kebutuhan. Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti. Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis. Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi. Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.
8 Meningkatnya	8.1 Meningkatnya	Meningkatnya	Memanfaatkan Fasilitas

daya saing pemuda dan olahraga	Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)	Prestasi Atlit.	Olahraga dan Pembinaan yang Berkelanjutan. Meningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan melalui Pelatihan maupun Kursus. Pemassalan Olahraga dikalangan Masyarakat.
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan (Akademis, Seni, Budaya, Olahraga dan Wirausaha Muda)	Mendorong Program- Program Kepemudaaan Yang Kreatif Dan Inovatif Di Berbagai Bidang. Mengembangkan Sistem Penghargaan Terhadap Capaian Prestasi Pemuda Di Bidang Seni, Olahraga, Budaya, Dan Akademis. Meningkatkan Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Pemuda.

Prioritas Daerah

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kesenjangan dan Keadilan Gender
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani
7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya
8. Peningkatan Daya Sain Pemuda dan Olahraga

Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan bertahap selama 5 (lima) tahun melalui sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Data Geografis Wilayah

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung dengan Ibukotanya berkedudukan di Kota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang.

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°- 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan batas administrasi :

- a. Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
- b. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
- c. Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
- d. Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar berikut :

Gambar
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan



Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 Km² dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel
Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM²
1	OGAN KOMERING ULU	4.797,06
2	OGAN KOMERING ILIR	18.359,04
3	MUARA ENIM	7.383,90
4	LAHAT	5.311,74
5	MUSI RAWAS	6.350,10
6	MUSI BANYUASIN	14.266,26
7	BANYUASIN	11.832,99
8	OKU TIMUR	3.370,00
9	OKU SELATAN	5.493,94
10	OGAN ILIR	2.666,09
11	EMPAT LAWANG	2.256,44
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.840,00
13	MUSI RAWAS UTARA	6.008,55
14	PALEMBANG	369,22
15	PAGAR ALAM	633,66
16	LUBUK LINGGAU	401,50
17	PRABUMULIH	251,94

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan didominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas. Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah (2.107M), Gunung Bungkok (2.125 M). Dan lain-lain. Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 km² dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas permukaan laut.

Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.

Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 Km² didiami penduduk pada tahun 2021 sebanyak 8.490.335 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 Km² didiami penduduk pada tahun 2021 semester I (31 Juni 2021) sebanyak 8.490.335 jiwa. Penduduk ini tersebar di 17 Kabupaten / Kota, 241 Kecamatan dan 3.238 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Palembang sebanyak 1.685.219 Jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 147.537 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 4.327.272 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.163.063 jiwa sebagaimana tertera pada tabel dibawah :

**REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
PER KECAMATAN (DAK-2)
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 Desember 2021)
PER KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	KABUPATEN /KOTA	JML KEC.	JML DESA/ KEL.	JUMLAH PENDUDUK			DATA KELUARGA
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	190.553	181.719	372.272	111.358
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	381.188	359.158	740.346	245.900
3	MUARA ENIM	22	255	313.924	301.796	615.720	189.310
4	LAHAT	24	377	222.766	212.653	435.419	131.312
5	MUSI RAWAS	14	199	209.840	200.370	410.210	128.573
6	MUSI BANYUASIN	15	240	334.491	317.370	651.861	206.050
7	BANYUASIN	21	304	423.644	400.907	824.551	259.097
8	OKU TIMUR	20	312	335.949	319.754	655.703	206.214
9	OKU SELATAN	19	259	216.572	200.852	417.424	120.484
10	OGAN ILIR	16	241	216.653	211.455	428.108	130.370
11	EMPAT LAWANG	10	156	172.629	162.395	335.024	102.019
12	PALI	5	71	101.578	99.277	200.855	60.254
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	99.093	95.706	194.779	59.168
14	PALEMBANG	18	107	852.793	851.745	1.704.538	510.408
15	PAGAR ALAM	5	35	75.570	72.070	147.640	44.296
16	LUBUK LINGGAU	8	72	117.191	115.548	232.739	70.440
17	PRABUMULIH	6	37	99.824	98.781	198.605	59.352
	JUMLAH	241	3.238	4.364.258	4.201.556	8.565.814	2.634.605

Sumber Data : Hasil Konsolidasi dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)*
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,01	70,24	0,328%
2	Angka Kemiskinan	12,98	12,79	-1,464%
3	Angka Pengangguran	5,51	4,98	-9,619
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,11	3,58	3354,55%
5	Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB)	54.084.410	57.487.440	6,292%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.338	0.340	0,592%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro
- Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya
- Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan
- Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro,

dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya 2. Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Aset Tak Berwujud 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 1. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2. Penambahan Ruang Kelas Baru

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			3. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 5. Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa 6. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA 7. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 14. Pengadaan Mebel Sekolah 15. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 17. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 18. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 19. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 20. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			21. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 22. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 23. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 3. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4. Pembangunan Ruang Praktik Siswa 5. Pembangunan Ruang Laboratorium 6. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 7. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10. Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 11. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12. Pengadaan Mebel Sekolah 13. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 14. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 16. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			17. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 18. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 19. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 20. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 21. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Khusus 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 4. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 5. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6. Pengadaan Mebel Sekolah 7. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 8. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 9. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 10. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus 11. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			12. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
2.a	Kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Peraturan Perundang-undangan 5. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 1. Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2. Subkegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3. Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 4. Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5. Subkegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 6. Subkegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 7. Subkegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan 8. Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			9. Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 2. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 5. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 9. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 11. Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 12. Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 13. Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 15. Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 16. Subkegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 17. Subkegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit 18. Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 19. Sub kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3. Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 1. Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Subkegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 1. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 1. Subkegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
3.a	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1. Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4. Pembangunan Jalan 5. Rekonstruksi Jalan 6. Rehabilitasi Jalan 7. Pemeliharaan Berkala Jalan 8. Pemeliharaan Rutin Jalan 9. Pembangunan Jembatan 10. Penggantian Jembatan 11. Pemeliharaan Berkala Jembatan 12. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 13. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			2. Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 2. Sistem Informasi Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 2. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 3. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
3.b	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Alat Besar 3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 5. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 6. Pembangunan Polder/Kolam Retensi 7. Normalisasi/Restorasi Sungai

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			8. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 9. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 10. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 11. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 5. Operasional Unit Pengelola Irigasi

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSI <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD <i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			<i>dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i> 1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP 2. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN <i>Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i> 1. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 2. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 3. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman <i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i> 1. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 2. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 4. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM <i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</i> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 3. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 4. Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH <i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</i> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN <i>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</i>

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			1. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG <i>Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i> 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 3. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA <i>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			3. Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI <i>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</i> 1. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan 2. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 3. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi <i>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</i> 1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 3. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 4. Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU 5. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi <i>Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</i>

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			1. Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan 2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
5.a	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/ <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Fasilitas Keprotokolan</i> 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			yang bernuansa Hak Asasi Manusia Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 1. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 1. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			6. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Bahan/Material 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pengadaan Mebel 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			Sosial Provinsi 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama yang mudah diakses 4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 6. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			5. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 1. Penyediaan Permakanan Rp. 1,805,760,000 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 5. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 5. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya si Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan
			dan Sosial 5. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 6. Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAFZA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENANGANAN BENCANA 3. Penyediaan Permakan 4. Penyediaan Sandang 5. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 6. Pelayanan Dukungan Psikososial Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi dalam tiga kategori yakni rendah, tinggi dan sangat tinggi. EPPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 memperoleh skor 2.8427 dengan status kinerja Tinggi , EPPD tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019 dan hasil EPPD tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 belum ada hasil dari Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga Provinsi Sumatera Selatan belum mengetahui posisi peringkat ditingkat nasional.

4. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

Untuk Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan realisasinya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat disimpulkan capaian kinerja untuk Indikator Opini Laporan Keuangan Daerah adalah “sangat berhasil”. Nilai WTP baru dikeluarkan oleh BPK pada bulan Maret, karena saat ini masih dalam proses audit dari pihak BPK.

Di Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan cara:

- Menindaklanjuti temuan-temuan BPK.
- Memperkuat sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan.
- Penyajian Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan, workshop dan sosialisasi.
- Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan Surat Keputusan Gubernur.

- Dilaksanakannya reviu terhadap Laporan Keuangan oleh Inspektorat Provinsi yang di damping Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan melakukan usaha-usaha diatas, maka dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan oleh BPK-RI dituliskan sebagai berikut:

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2020, dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas, serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 adalah WTP dengan Paragraf Penjelasan, karena penyajian piutang pajak daerah dalam Laporan Keuangan pada tahun tersebut belum bisa diyakini kewajarannya.

5. Inovasi Daerah

Berikut daftar inovasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Dapodik
- System informasi RS Siti Fatimah
- Simandak
- Rumah Intan (Inovasi Kesehatan) Sumsel
- VCT Online Via WhatApp
- Sitarung (Sistem Informasi Penataan Ruang)
- GIS Pengairan
- Anjungan Bansos Sriwijaya
- Labour Market Information System
- ATSC
- SIM Perlindungan KA Prov. Sumsel

- Portal Sumsel
- Sumsel satu data
- Ppid
- Simata
- Sumselmaju
- Online Data Sistem (ODS) Koperasi
- Sumsellmall
- Data pokok kebudayaan sumatera selatan
- Aplikasi sp2bks (surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit)
- System informasi produksi benih dan sertifikasi benih
- Peta pertambangan
- Layanan informasi dan data ESDM
- Sistem informasi online industry kecil menengah (IKM) sumsel (SIMFONIS)
- Srikandi
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sistem integrasi kendali dan notifikasi data izin
- System integrasi kendali dan notifikasi data izin
- System perizinan terpadu daring (Online Single Submission/OSS)
- Aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu terintegrasi dengan OSS
- System informasi laporan administrasi kependudukan
- System informasi gender dan anak
- Peta pantau ekosistem gambut
- System informasi monitoring evaluation reporting
- System informasi gerakan terpadu serentak
- eMonev
- Sistem perencanaan elektronik
- System informasi pengembangan hilirisasi daerah
- Jaringan informasi geospasial nasional
- System informasi perencanaan pendidikan dan kesehatan
- System informasi infrastuktur konektivitas
- Tata naskah kepegawaian secara elektronik (E-Takah)
- E-Kinerja

- SIM Kepegawaian
- Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
- Publikasi Penelitian Penerapan dan Kebijakan
- SIM WBTB (warisan budaya tak benda)
- Database penelitian
- Sentra HKI Sumsel
- Inovasi Daerah
- SIMDA Keuangan dan Aset
- SIMonev
- E-Sumsel
- E-Samsat/E-Dempo
- Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)
- JDIH
- Monev.lkpp.go.id
- Layanan pengadaan secara elektronik
- E-catolog/e-purchasing
- System informasi rencana umum pengadaan
- Lakip, saki dan Renstra
- Jaringan inovasi pelayanan public
- SI analisa jabatan
- Data Sumsel

6. Penutup

Selaku Gubernur Sumatera Selatan, kami telah berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan yang telah digariskan dan berkat adanya dukungan dari seluruh Badan, Dinas, Biro dan Kantor di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah syukur, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pelaksanaan tugas-tugas Tahun 2021 yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah menunjukkan perkembangan, kemajuan dan peningkatan yang cukup menggembirakan. Apa yang kita lakukan

bersama-sama selama Tahun 2021 semata-mata ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat dan lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan banyak ditemukan kendala-kendala, kendati pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan modal bagi evaluasi dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang.

Segala dukungan yang telah diberikan kepada kami, dengan tulus disampaikan ucapan terima kasih, dengan dukungan tersebut telah memberikan kekuatan dan semangat untuk bekerja keras, diikuti semangat pengabdian dalam mengemban tugas yang mulia ini. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada seluruh pihak atas saran, koreksi dan kritik, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

Kesemuanya itu, merupakan wujud rasa ikut bertanggung jawab dari semua pihak sebagai peran serta untuk memacu peningkatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini.

Untuk itu, mari kita mewujudkan Sumatera Selatan Maju untuk Semua, yang mensejahterakan warga Sumatera Selatan dengan percepatan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan serta perlindungan-Nya kepada kita semua, Amin